

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2016. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Munif. 2016. *Perikatan Bersyarat Batal*. Yogyakarta: UII Press.
- A. D Belifante dan H. Boerhanoeddin Soetan Batoeah. 1983. *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Binacipta.
- Ahmadi Miru. 2016. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- A. Pitlo. 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa, Alih Bahasa M. Isa Arief*. Jakarta: Intermasa.
- Chainur Arrasajid. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Kebudayaan dan Pendidikan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eddy O.S Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Freddy Haris dan Lena Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. Jakarta: Pt. Lintas Cetak Djaja.
- G.H.S. Lumbang Tobing. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. hlm.51
- Habib Adjie. 2010. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Surabaya: Refika Aditama.
- , 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- , 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2016. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- , 2013. *Menjalin Pemikiran - Pendapat tentang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- , 2015. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- , 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Surabaya: Refika Aditama.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Terjemahan Raisul Muttaqien*. Bandung: Nusa Media.
- Herlien Budiono. 2018. *Demikian Akta Ini*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Irawan Soerodjo. 2001. *Kepastian Hukum dan Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Krisna Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata. Class Action, Arbitras dan Alternatif Serta Mediasi*. Bandung. PT. Grafiti.
- M.Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada.
- , 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philippus M. Hardjon. 2001. *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*. Surabaya: Surabaya Post.
- Purnadi Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Salim HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Praditya Paramitha

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

-----, 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. 1993. *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rinika Cipta.

Jurnal

Made Dita Widyantari. *Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. I (2019)

Mardiyah (dkk). *Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Acta Comitatus: Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan. Vol. I (2017).

Yohanna Endang (dkk), *Kajian Yuridis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009*, Jurnal Magister Kenotariatan Brawijaya, hlm.3

Peraturan Perundang-undangan

Burgelijke Wetboek.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Sumber Non Hukum

Wawancara dengan Penerjemah IT cabang Makassar, pada tanggal 03 Desember 2019

Wawancara dengan Penerjemah AT cabang Makassar, pada tanggal 04 Desember 2019

Wawancara dengan Penerjemah AT pusat, pada Tanggal 28 Juli 2020

Wawancara dengan Notaris HW, pada tanggal 21 Januari 2020

Wawancara dengan Notaris HA, pada tanggal 13 Februari 2020

Wawancara dengan Notaris F, pada tanggal 14 Februari 2020

Wawancara dengan Notaris AS, pada tanggal 9 Juli 2020

Wawancara dengan Notaris R, pada tanggal 13 Agustus 2020

Wawancara dengan Notaris Z, pada tanggal 10 September 2020